



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frederik C.P Koenunu, ST, M.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 20 Februari 2024

Pihak Kedua,

Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,

Frederik C.P Koenunu, ST, M.H

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten 3 Sekda | |
| Kepala Biro Organisasi | |

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------------|--|
| Sekretaris | |
| Kasubag Kepegawaian dan Umum | |
| Perencana Ahli Muda | |

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI | | TARGET | | FORMULA INDIKATOR |
|----|---|--|---------------------|--------------------|--------|------|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. | Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT. | 3,83 Index point | 2,5 Index point | | | Skor Hasil Evaluasi penerapan SPBE di Lingkup Provinsi NTT oleh Kemempnan RB. |
| | | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik. | 77 Skor | 80 Skor | | | Skor Hasil Evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT oleh Komisi Informasi Pusat |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%) | - | 70% | | | Σ Jumlah PD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral pada tahun berjalan -----x 100 |
| | | Indeks Keamanan Informasi (Level) | II + | III | | | Skor hasil evaluasi Tingkat kematangan, Tingkat penerapan SN/ISO 27001:2013 serta peta area tata Kelola keamanan sistem informasi di lingkup Pemerintah Provinsi Tahun 2024 |
| | | Persentase PD yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo | 100 % | 100 % | | | Σ Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan -----x 100 Σ Jumlah PD yang ditargetkan untuk penyediaan layanan internet |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI | | TARGET | FORMULA INDIKATOR |
|----|-------------------|---|------------------------|------------------------|--------|--|
| | | | 2023 | 2024 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral (%) | - | 70% | | $\frac{\sum \text{Jumlah PD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah PD yang ada di lingkup Pemprov NTT}} \times 100$ |
| | | Indeks Keamanan Informasi (Level) | - | III | | $\frac{\sum \text{Level IKAMI Daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\sum \text{Level IKAMI Daerah hasil evaluasi BSSN pada tahun berjalan}} \times 100$ |
| | | Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo (Jumlah Perangkat Daerah) | 39 Perangkat Daerah | 34 Perangkat Daerah | | $\frac{\sum \text{Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah PD yang ada di Lingkup Pemprov NTT}} \times 100$ |

B. Pelaksanaan Anggaran

| | Uraian | Alokasi | Keterangan |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1. | APBD | | |
| | a) Belanja (program) | Rp. 14.885.584.614,- | Realisasi minimal 85% |
| | 1. Penujng Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 7.790.014.652,- | Realisasi minimal 90% |
| | 2. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 1.072.000.000,- | Realisasi minimal 85% |
| | 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 5.858.569.962,- | Realisasi minimal 85% |
| | 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp. 115.000.000,- | Realisasi minimal 85% |
| | 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Rp. 50.000.000,- | Realisasi minimal 85% |
| | b) Pendapatan | Rp. 70.000.000,- | Realisasi minimal 90% |
| | Jumlah Belanja + Pendapatan | Rp. 14.955.584.614,- | Realisasi minimal 90% |
| 2. | APBN | | |
| | a) Program Dekonsentrasi Tugas Pembantuan | Rp. - | - |
| | 1. | | |
| | b) Program Tugas Pembantuan | Rp. - | - |
| | Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan | Rp. - | - |

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E-Purchasing* (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang Dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK ;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APTP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah Tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);

N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Ayodhia G. L. Kalake

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Asisten 3 Sekda |  |
| Kepala Biro Organisasi |  |

Kupang, 20 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C.P. Koennu, ST, M.H

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------------|---|
| Sekretaris |  |
| Kasubag Kepegawaian dan Umum |  |
| Perencana Ahli Muda |  |